

# Barisan Tani Indonesia (BTI) pada Masa Revolusi Indonesia, 1945-1950

**WILLY ALFARIUS**

Mahasiswa Pascasarjana, Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada  
Email: [willy.alfarius@gmail.com](mailto:willy.alfarius@gmail.com)

## Abstract

This article discusses the process of forming Barisan Tani Indonesia (BTI) in 1945, the work programs they offered to improve the welfare of the peasants, and the dynamics that occurred within the organization throughout the Indonesian Revolution (1945-1949). In particular, this article highlights the emergence of ideas and discourses that are used as a basis for determining their work programs. This article uses historical methods to explore various sources such as newspapers and magazines published in the period in context and previous studies on the BTI. This article argues that agricultural modernization was one of the most dominant work agendas raised and offered by BTI. Discourse regarding agricultural modernization appears in various publications they produce. They consider agricultural modernization to be an important key to improving the welfare of Indonesian peasants, as has happened in Europe and America. However, throughout the first five years of BTI's existence, especially during the Indonesian Revolution, many work programs were not implemented due to the war situation. Following the end of the War of Independence in 1949, the BTI could reorganize its organization and carry out its work program, marked by the Third BTI Congress in 1950.

**Keywords:**  
agriculture  
modernization;  
Indonesian  
Peasant Front;  
Indonesian  
revolution

## Abstrak

Artikel ini menjelaskan proses pembentukan Barisan Tani Indonesia (BTI) pada 1945, program kerja yang mereka tawarkan untuk perbaikan nasib kaum tani, serta dinamika yang terjadi di dalam tubuh organisasi itu sendiri sepanjang periode Revolusi Indonesia (1945-1949). Terutama sekali disorot mengenai kemunculan ide dan serta wacana yang digunakan sebagai landasan untuk menentukan program kerja mereka. Menggunakan metode sejarah, artikel ini terutama didasarkan pada sumber-sumber sezaman seperti surat kabar dan majalah serta beberapa kajian sebelumnya yang telah dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa modernisasi pertanian menjadi salah satu agenda kerja paling dominan yang diserukan dan ditawarkan oleh BTI. Wacana mengenai modernisasi pertanian muncul dalam berbagai terbitan yang mereka hasilkan. Mereka menganggap modernisasi pertanian menjadi kunci penting bagi perbaikan nasib kaum tani Indonesia, seperti halnya yang telah terjadi di Eropa dan Amerika. Hanya saja, sepanjang lima tahun petama BTI berdiri, terutama pada masa Revolusi Indonesia, banyak program kerja yang tidak terlaksana oleh karena situasi perang. Baru setelah Perang Kemerdekaan berakhir pada 1949, BTI dapat menyusun kembali organisasi dan menjalankan program kerjanya, yang ditandai dengan jalannya Kongres III BTI pada 1950.

**Kata Kunci:**  
Barisan Tani  
Indonesia;  
modernisasi  
pertanian;  
revolusi  
Indonesia

## Pendahuluan

Setelah lama terbelenggu dan terkunci sebagai objek perahan negara kolonial, terbentuknya Negara Republik Indonesia pada 1945 membawa angin segar bagi kaum tani Indonesia, terutama dalam usahanya untuk mengorganisasi diri dan memperbaiki nasib mereka sendiri. Tidak lama setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, berbagai organisasi tani bermunculan di seantero wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera yang memiliki basis petani cukup besar. Dengan mengusung berbagai aliran politik maupun cakupan wilayah, berbagai organisasi tani didirikan di kantong-kantong wilayah pertanian, merespons terbukanya kesempatan bagi mereka yang kini telah sama statusnya sebagai warga negara yang berdaulat. Berlangsungnya Revolusi dan perang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan kembalinya kekuatan militer kolonial semakin menguatkan alasan bagi berbagai elemen dalam masyarakat Indonesia untuk mengorganisasi dirinya, termasuk dalam hal ini kaum tani.

Termasuk dalam gelombang pasang terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat ini adalah Barisan Tani Indonesia (BTI). Dideklarasikan di Yogyakarta pada 25 November 1945, atau hanya tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan, BTI kemudian tumbuh menjadi organisasi tani yang besar dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Terutama pada pertengahan dekade 1950-an hingga 1960-an, BTI semakin berkembang dalam jumlah keanggotaan serta dikenal sebagai organisasi tani yang paling progresif dan dalam beberapa hal cukup radikal, terutama dalam persoalan mengenai reforma agraria (Achdian, 2009: 77-97). Hal inilah yang kemudian menjadi aspek paling dominan dari berbagai kajian yang ada mengenai BTI.

Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai BTI masih terbatas pada dekade 1960-an saja, terutama pasca Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan pada 1960. Studi mengenai BTI secara khusus maupun gerakan tani secara umum yang dilakukan oleh Justus M. van der Kroef (1963), Gerrit Huizer (1972), Rex Mortimer (1972), Sartono Kartodirdjo (1984), Kuntowijoyo (1993), dan Aminuddin Kasdi (2001) menunjukkan kecenderungan tersebut, bahwa aktivitas BTI seolah hanya berkulat dalam persoalan reforma agraria saja. Maka kemudian, dapat dipahami jika historiografi Indonesia masih terbatas menempatkan BTI sebagai sebuah organisasi kaum tani yang seolah-olah hanya eksis dan bergerak di sekitar dekade 1960-an saja. Padahal jauh sebelum itu, BTI sudah eksis serta memiliki berbagai dinamika organisasi serta tawaran program kerja yang cukup bervariasi. Hanya saja, proses awal pembentukan BTI serta program-program kerja mereka pada masa awal ini belum banyak dibahas.

Beberapa tulisan mengisyaratkan hal tersebut, seperti misalnya Ruth T. McVey (1990), Grace Leksana (2016), serta Ben White (2016) yang memberikan semacam petunjuk awal bahwa BTI memiliki banyak sekali cara serta tawaran ide untuk mengubah nasib kaum tani Indonesia menjadi jauh

lebih makmur dan sejahtera. Misalnya saja BTI melakukan pembentukan lembaga pendidikan, mensponsori inovasi dan riset-riset pertanian, sampai penelitian di pedesaan untuk mencari sebab riil kemiskinan kaum tani Indonesia. Berbagai program ini tentu saja tidak lahir dalam semalam, melainkan telah dirintis jauh ketika BTI sedang terbentuk dan mulai memapankan bentuk organisasinya di tengah kemelut Revolusi Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di atas, berbagai macam aspek dan varian program BTI ini masih amat sedikit dieksplorasi dan diteliti lebih mendalam.

Perlu hendaknya ditelisik lebih jauh proses permulaan terbentuknya BTI, terutama cara mereka menentukan arah organisasi pada awal berdirinya, hingga kemudian muncul menjadi organisasi tani yang dikenal sangat militan memperjuangkan hak atas tanah bagi petani penggarap pada dekade 1960-an. Maka kemudian, artikel ini memfokuskan pembahasan mulai sejak terbentuknya BTI pada 1945 ketika mereka terbentuk hingga 1950, tahun berakhirnya Revolusi Fisik dan dimulainya kembali proses pembentukan BTI yang sempat karut-marut sepanjang empat tahun Revolusi. Tulisan ini terutama berangkat dari pertanyaan bagaimana proses terbentuknya BTI? Apa saja program-program kerja awal yang mereka tawarkan? Sejauh mana implementasi berbagai usulan mereka tersebut dapat terwujud di lapangan pertanian? Bagaimana keterlibatan BTI dalam Revolusi Indonesia? Menggunakan metode sejarah, tulisan ini terutama didasarkan pada sumber-sumber sezaman seperti surat kabar dan majalah.

### **Revolusi dan Pembentukan Barisan Tani Indonesia**

Proklamasi kemerdekaan dan lahirnya negara Republik Indonesia pada 1945 membawa perubahan yang cukup signifikan bagi kaum tani, terutama dalam cara mereka mengorganisasi diri, memperjuangkan nasib, serta menyampaikan aspirasi diri dan kelompok mereka sendiri. Tentu saja kemudian individu-individu yang telah dididik dengan model pendidikan modern (terutama ala Barat), berbasis di perkotaan, dan telah mengenal suatu ideologi tertentu yang lantas berperan mengawali, membentuk, dan mengorganisasi petani ke dalam suatu lembaga atau wadah. Termasuk dalam hal ini Barisan Tani Indonesia (BTI) yang dibentuk oleh para kaum terpelajar perkotaan, yang sebagiannya juga berlatar belakang keluarga petani, di Yogyakarta persis pada bulan-bulan pertama lahirnya negara Indonesia pada 1945. Dilihat dari latar belakang pendidikan dan riwayat keluarga, nyaris seluruh pendiri maupun pengurus awal BTI adalah para kaum terdidik-terpelajar dan telah memiliki pengalaman berorganisasi sejak masa pra kemerdekaan (Sartono Kartodirdjo, 1984: 117).

Perubahan pola gerakan tani ini tentu saja dimungkinkan atas lahirnya sebuah negara merdeka, yang mana seperti disebutkan oleh Mubyarto membuat status seorang petani bukan lagi kuli seperti di masa lalu (era kolonial Belanda) dengan segala beban dan kewajiban yang melekat erat

padanya. Di alam kemerdekaan, petani telah menjelma menjadi rakyat, menjadi warga negara, yang memiliki hak dan kesempatan untuk ikut menentukan jalannya suatu negara, termasuk di dalamnya persoalan politik pertanian yang menentukan untung-ruginya kehidupan petani itu sendiri (Mubyarto, 1983: 33). Inilah era di mana petani sebagai seorang individu warga negara mempunyai posisi yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat lainnya untuk menyuarakan secara langsung apa yang menjadi aspirasi mereka sendiri. Ahmad Nashih Luthfi menyebutkan, pendidikan kader yang mulai diberikan kepada kaum tani di masa awal kemerdekaan tidak hanya sekadar membekali mereka dengan keterampilan, melainkan juga sebagai upaya penyadaran akan makna sebagai warga negara (Ahmad Nashih Luthfi, 2011: 126).

Para pendiri BTI berasal dari latarbelakang sosial dan politik yang beragam. Misalnya saja Mochamad Tauchid, yang adalah seorang guru Taman Siswa Banyumas pada 1933 hingga 1936. Sejak 1933 itu pula Tauchid masuk menjadi anggota Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) daerah Banyumas (Anderson, 1988: 492). Bersama S. Sardjono, Wijono Surjokusumo, dll. ia menjadi salah satu organisator yang cukup penting dan berpengaruh dalam pembentukan struktur BTI di awal organisasi tersebut berdiri. Selain itu, dapat disebut pula bahwa ia menjadi pemikir dan konseptor mengenai gerakan tani dan arah perjuangan organisasi tani di masa-masa awal Indonesia merdeka. Hal ini ditunjukkan melalui karyanya, *Masalah Agraria*, yang kemudian menjadi semacam referensi utama dalam hal perjuangan tani dan agraria di Indonesia pasca kemerdekaan. Sedangkan S. Sardjono sendiri adalah sosok yang berlatarbelakang sebagai guru. Pada masa pergerakan nasional, ia pernah menjadi anggota Pendidikan Nasional Indonesia dan Gerindo (Anderson, 1988: 475). Dilihat dari struktur pengurus BTI pada masa awal, banyak dari para pendiri tersebut juga sekaligus sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Sebelum disepakati dan diputuskan menjadi sebuah organisasi berskala nasional, pada mulanya BTI adalah sebuah organisasi kaum tani lokal yang cakupan wilayahnya terbatas berada di Yogyakarta dan sekitarnya (*Suara Tani*, 25 November 1950). Bersama dengan Surakarta, di masa kolonial Yogyakarta adalah wilayah swapraja (juga dikenal dengan sebutan *vorstenlanden*), suatu daerah yang berstatus semi otonom alias berhak mengatur tata pemerintahannya sendiri. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah karesidenan lain di Jawa, nyaris seluruh tanah-tanah pertanian di kedua wilayah tersebut adalah milik raja dan keluarganya, para bangsawan, juga para priyayi (Houben, 2017: 562-568). Oleh karena konsentrasi kepemilikan tanah berada di tangan para elite, baik elite kerajaan maupun desa, maka sebagian besar petani yang terdapat di sini adalah para petani tanpa tanah, baik mereka yang masuk dalam

kategori petani penggarap hingga buruh tani.

Kembali ke pembentukan BTI, sekitar satu setengah bulan pasca proklamasi kemerdekaan, dengan diinisiasi antara lain oleh Hadisiswojo, Ismail, Sumarsono, Pronoasmoro, Karjodihardjo, dan Moch. Tauchid, berdirilah Barisan Tani Indonesia. Organisasi yang kemudian dikenal sebagai BTI Yogyakarta tersebut dideklarasikan pada 28 Oktober 1945 dalam sebuah konferensi yang diadakan di Balai Mataram sejak sehari sebelumnya (*Kedaulatan Rakjat*, 29 Oktober 1945).<sup>1</sup> Liputan dalam *Kedaulatan Rakjat* menyebutkan konferensi ini dihadiri sekitar 310 orang delegasi utusan BTI di tingkat kabupaten dan kapanewon di seluruh wilayah Yogyakarta. Selain utusan dari BTI sendiri, hadir pula wakil-wakil kaum tani dari daerah lain seperti dari Tasikmalaya, Rajapolah, Sidareja, Karanganyar, Kutowinangun, Purworejo, Magelang, Temanggung, Ambarawa, Semarang, Imogiri-Surakarta, Pati, Blora, Cepu, Bojonegoro, Padangan, hingga Kediri. Artrinya keberadaan BTI yang saat itu masih bersifat lokal telah menarik perhatian kalangan tani dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. P.J. Suwarno menyebutkan bahwa BTI bersama-sama dengan kelompok pemuda memegang peranan penting bagi pembentukan kembali (reorganisasi) pemerintahan dan birokrasi Yogyakarta di masa awal kemerdekaan Indonesia. Dengan punggawa para pendidik di lingkungan Taman Siswa seperti Wijono dan Tauchid, BTI sebagai organisasi kader tani memainkan peranan penting, terutama dalam posisinya sebagai organisasi binaan KNID (P.J. Suwarno, 1994: 203).

Konferensi tersebut diawali dengan sebuah uraian oleh Tauchid mengenai kedudukan kaum tani dalam masyarakat Indonesia sebagai negara agraria; keadaan kaum tani pada zaman feodal, penjajahan Belanda dan Jepang, hingga masa kemerdekaan; kewajiban kaum tani untuk ikut serta bersama golongan-golongan lain dalam Revolusi Indonesia; serta kewajiban berorganisasi bagi rakyat tani untuk mewujudkan cita-citanya. Uraian ini sendiri kemudian diterbitkan menjadi buku pada 1946 dengan judul *Perjuangan Tani*. Dari sini dapat dilihat bahwa sejak awal pembentukannya, konsepsi mengenai kaum tani dan perjuangan tani Indonesia sudah disusun dan diformulasikan sedemikian rupa oleh para pengurus dan organisator BTI.

Konferensi tersebut selain menyetujui berdirinya BTI Yogyakarta, juga mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta menghasilkan susunan pengurus sebagai berikut:

---

1) Hanya saja *Suara Tani* dalam edisi ulang tahun BTI ke-5 menyebutkan bahwa deklarasi diadakan pada 8 Oktober 1945. Lihat "Memperingati: 5Th. Barisan Tani Indonesia", *Suara Tani*, Tahun V, Nomor 8/9, 25 November 1950. Namun kemungkinan besar tanggal yang disebut terakhir ini kurang tepat, mengingat dalam uraian yang sama, penulis menyebutkan bahwa ia hanya mengandalkan ingatan saja dalam menuliskan kenang-kenangan tersebut oleh karena catatan dan arsip mengenai BTI hampir seluruhnya musnah dalam bumi-hangus ketika terjadi Agresi Militer Belanda II pada 1948.

Ketua	: Wijono Surjokusumo
Wakil Ketua I/Bagian	: S. Sardjono
Perjuangan	
Wakil Ketua II	: Hadisiswojo
Panitera	: S.A. Sudibjo, Sumarsono
Organisasi	: Sajogo, Pronoasmoro, Ismail, Sunarjo
Penerangan/Pendidikan	: Moch. Tauchid
Sosial/Ekonomi	: Suradi
Perjuangan	: Tasman, Karjodihardjo
Badan Penasihat	: Ir. Purbodiningrat, KRT Taniprodjo, Mustakim, R.M. Surjopranoto, Drs. Danuhusodo, M.R. Sajid Mangunjudo

Setidaknya ada empat hal yang tercatat sebagai sebuah pencapaian BTI Yogyakarta pada bulan-bulan pertama organisasi ini berdiri. BTI menyebutkan bahwa mereka terlibat dalam usaha pendemokratisan pemerintahan desa di sekitar Yogyakarta dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan (DPRK) yang lantas disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta. Berikutnya bersama-sama dengan KNID bagian Kemakmuran, BTI ikut menentukan harga penjualan padi yang berpihak kepada rakyat tani, dan menghapus kewajiban setor padi kepada pemerintah. Selain itu BTI juga menerbitkan majalah *Soeara Tani*, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sebagai media resmi organisasi dengan jumlah oplah sebanyak 20.000 eksemplar. Juga dibuka sebuah biro konsultasi yang dipimpin oleh Mr. Sajid Mangunjudo dan Ir. Purbodiningrat, yang mana keduanya adalah pengurus BTI.

Pembentukan BTI Yogyakarta ini juga mengesahkan Anggaran Dasar sebagai berikut, (*Kedaulatan Rakjat*, 19 Oktober 1945):<sup>2</sup>

**Nama:** Barisan Tani Indonesia

**Kedudukan:** Pimpinan Pusat berkedudukan di Mataram (Yogyakarta)

**Tujuan:** Memperteguh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat menuju masyarakat sosialis

**Cara dan Dasar Perjuangan:** Menjalankan perjuangan revolusioner dengan berdasarkan atas hak persamaan anti kapitalisme dan imperialisme

**Usaha:**

---

2) Anggaran Dasar BTI ini telah disusun oleh para perancang BTI (antara lain Hadisiswojo, Ismail, Sumarsono, Pronoasmoro, Karjodihardjo, Moch. Tauchid, Wijono, S.A. Sudibjo, Sajoga, dan Tasman) sebelum kemudian dibawa ke dalam konferensi dan disahkan di sana pada 27-28 Oktober 1945.

1. Menyokong usaha menyempurnakan susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dengan syarat: jaminan dalam Undang-Undang Negara atas kedudukan kaum tani dalam masyarakat
2. Menanam dan memperdalam keinsyafan kaum tani menuju pertanian modern yang berdasar persamaan
3. Dalam badan-badan perwakilan rakyat, wakil-wakil kaum tani menganjurkan politik langsung menuju masyarakat sosialis
4. Di luar badan-badan perwakilan rakyat mempergunakan tiap-tiap kesempatan untuk memperbaiki nasib dan kedudukan kaum tani
5. Mengikhtiarkan kembalinya hak-hak rakyat tani umumnya yang hilang karena segala sifat penjajahan untuk menjamin keselamatan

**Susunan Pimpinan:** Dewan Pimpinan terdiri atas ketua, panitera, bendahara, dan pembantu

**Anggota:** 1. Segenap kaum tani Indonesia, 2. Barisan dibagi menjadi barisan: tani kader, tani biasa, dan pemuda tani

**Anggota-Anggota Dewan Pimpinan:** Dibentuk atas hasil mufakat musyawarat

**Perbendaharaan:** Terdapat dari iuran anggota dan lain-lain sokongan yang sah

Telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Dewan Pimpinan lengkap Barisan Tani Indonesia pada 11-12 Oktober 1945 di Mataram.

Selain menjadi arena untuk pengesahan berdirinya BTI dengan segenap perangkat kerja dan tujuannya, Konferensi BTI perdana ini juga menghasilkan dua buah mosi, yaitu Mosi Pertama mengenai Dewan Perwakilan Rakjat dan Mosi Kedua tentang Penghidupan Rakjat (*Kedaulatan Rakjat*, 29 Oktober 1945). Kedua mosi ini ditujukan antara lain kepada Presiden Sukarno, Sultan Hamengkubuwono, Pakualam, dan KNIP.

Lantas perubahan status BTI dari yang semula sebagai organisasi lokal menjadi nasional bermula dari kekecewaan para kader tani yang hadir dalam Kongres Buruh dan Tani yang berlangsung di Surakarta pada 5-7 November 1945. Kongres Buruh dan Tani sendiri berlangsung cukup ramai dengan dihadiri sekitar 3.000 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan 817 orang di antaranya berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, Sumatera, dll. (*Berita Indonesia*, 9 November 1945). Resepsi acara yang dilangsungkan di Gedung Harmonie itu juga dihadiri berbagai tokoh Republik seperti Mr. Iwa Kusumasumantri (Menteri Sosial), R.P. Soeroso (Komisaris Tertinggi Surakarta-Yogyakarta), Sunan Pakubuwana, Pangeran Mangkunegara, Wakil Gubernur Jawa Tengah, sampai Wakil Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Acara yang diketuai

oleh Soemodihardjo tersebut secara umum dipimpin oleh Pengurus Pusat Barisan Buruh Indonesia.

Kongres yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan bertempat di Societeit Habiprodojo tersebut meski mengusung nama sebagai kongres kaum buruh dan tani, nyatanya dianggap tidak mewakili kaum tani dan lebih dominan mengakomodir kepentingan kaum buruh saja. Hal ini disebabkan karena keputusan kongres tersebut, yang salah satunya menghasilkan pembentukan Partai Buruh Indonesia (PBI), tidak membicarakan persoalan-persoalan mengenai kaum tani. Maka dalam rangkaian kongres tersebut, wakil-wakil kaum tani yang berkumpul di Hotel Merdeka, Surakarta kemudian memutuskan untuk mengadakan kongres sendiri yang rencananya akan dilangsungkan di Yogyakarta mulai 22 November 1945. BTI Yogyakarta kemudian ditunjuk sebagai organisasi penyelenggara kongres, dengan mengundang seluruh organisasi-organisasi tani lainnya se-Indonesia.

Di tengah gempuran pasukan Inggris yang menyerang Yogyakarta, kongres akhirnya berlangsung di Museum Sonobudoyo dengan Moch. Tauchid bertindak sebagai pimpinan kongres (*Suara Tani*, 25 November 1950). Jumlah peserta kongres mencapai sekitar 300 orang yang nyaris seluruhnya terbatas berasal dari Pulau Jawa saja. Putusan awal dalam kongres tersebut adalah dibentuknya Partai Tani. Hanya saja keputusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk perdebatan mengenai AD-ART yang juga tidak berujung dan akhirnya gagal memperoleh titik temu. Sebagai gantinya maka disepakati berdirinya Barisan Tani Indonesia, dalam hal ini BTI sebagai sebuah organisasi nasional. Pengesahan berdirinya BTI dilakukan pada 25 November 1945, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir organisasi. Nyaris seluruh pengurus inti BTI Yogyakarta yang kemudian memegang kendali dengan menjadi pengurus inti BTI, yang kini sudah menjadi organisasi berlingkup nasional.

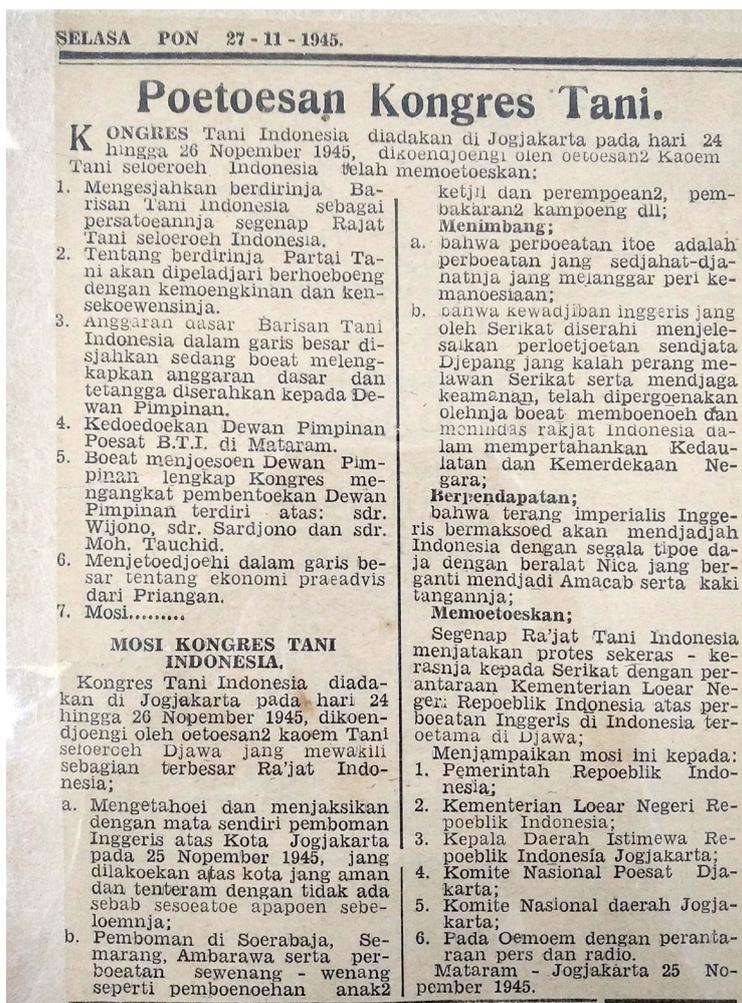
Lengkapnya, keputusan dari Kongres Tani adalah sebagai berikut, (*Berita Indonesia*, 28 November 1945):

1. Mengesahkan berdirinya Barisan Tani Indonesia sebagai persatuan segenap rakyat tani seluruh Indonesia
2. Soal berdirinya Partai Tani akan dipelajari berhubungan dengan kemungkinan dan konsekuensinya
3. Anggaran dasar Barisan Tani Indonesia dalam garis-garis besarnya disahkan, sedang buat melengkapkan anggaran dasar dan tetangga diserahkan pada Dewan Pimpinan
4. Kedudukan Barisan Tani Indonesia di Mataram
5. Untuk menyusun Dewan Pimpinan lengkap, kongres mengangkat tuan-tuan Wijono, Sardjono dan Tauchid untuk membentuk Dewan Pimpinan

6. Menyetujui dalam garis-garis besarnya soal ekonomi yang dipreadvieskan oleh utusan-utusan dari Bandung
7. "Soeara Tani" dijadikan majalah resmi Barisan Tani Indonesia

Tidak lama dari kongres pembentukan BTI ini, berdasarkan hasil putusan nomor enam maka oleh Wijono, Sardjono, dan Tauchid, berselang satu minggu kemudian telah dibentuk susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Harian BTI. Susunan dewan pimpinan tersebut adalah Wijono (Ketua I), S. Sardjono (Ketua II), S.A. Soedibjo (Ketua Organisasi), Sajoga (Ketua Sekretariat), dan Mochammad Tauchid (Ketua Penerangan). Dari sini kemudian tercatat bahwa Wijono adalah ketua umum DPP BTI yang pertama yang terbentuk pada 25 November 1945 tersebut.

Nama-nama di atas hanya segelintir saja dari susunan dewan pimpinan harian pusat, oleh karena untuk kelengkapannya mestilah menunggu sampai dewan pimpinan di tingkat daerah, cabang, dan anak cabang terbentuk. Hal tersebut juga diumumkan melalui surat kabar, agar nantinya setelah susunan



**Figur 1.** Potongan berita dalam *Kedaulatan Rakjat* yang mewartakan pembentukan Barisan Tani Indonesia beserta mosi yang dihasilkan dari Kongres Tani di Yogyakarta tersebut. **Sumber:** *Kedaulatan Rakjat*, 27 November 1945.

di tingkat bawah terbentuk, yang mana ditargetkan dapat selesai hingga Desember 1945, maka formasi pengurus harian akan dilengkapi (*Kedaulatan Rakjat*, 5 Desember 1945). Dalam periode awal ini pula BTI kemudian bermarkas di Bintaran Lor nomor 22, Yogyakarta.

Perlu digarisbawahi bahwa BTI lahir dalam suasana Revolusi Indonesia, sebuah situasi politik yang masih amat sangat labil dan penuh dengan pergolakan. Di satu sisi para pemimpin Republik sedang menentukan arah dan pilihan format sebuah negara bangsa. Di sisi lain ancaman kekuasaan kolonial lama Belanda, yang mencoba untuk kembali menguasai Indonesia sebagai sebuah kawasan yang mereka anggap masih sah sebagai bagian dari Kerajaan Belanda, juga terus menerus datang dan menggempur negara yang baru lahir tersebut. Maka kemudian BTI, dalam hal ini para pengurus maupun kader-kadernya, juga terlibat aktif dalam berbagai peristiwa politik dan sosial yang terus menerus terjadi nyaris setiap saat sepanjang 1945-1949. Tidak dapat dimungkiri bahwa BTI ikut melebur ke dalam arus pertentangan dan polarisasi politik yang cukup tajam di kalangan Republik yang terjadi sepanjang empat tahun tersebut.

Keterlibatan BTI dalam arus Revolusi bukannya tanpa alasan. Mereka menilai, kesejahteraan kaum tani tidak mungkin akan diperoleh selama mereka masih hidup dalam sistem kolonialisme (*Suara Tani*, 25 November 1950). Maka kemerdekaan menjadi sesuatu yang mutlak bagi kaum tani Indonesia untuk dapat memperbaiki nasib dan kehidupan mereka. Sebagaimana wujud keterlibatan dari perjuangan adalah dengan menjadi milisi dan bertempur dengan senjata, beberapa kader BTI, terutama dari bagian pemuda tani akhirnya ikut terjun dalam beberapa pertempuran. Termasuk kemudian dalam berbagai macam friksi internal di tubuh kekuatan politik Republik, beberapa pimpinan maupun kader BTI juga terlibat, misalnya dalam Peristiwa Madiun 1948.

Keterlibatan BTI paling awal salah satunya tercatat pada 1946 ketika mereka bergabung dalam Persatuan Perjuangan (PP), sebuah faksi politik yang berisi berbagai macam kekuatan politik seperti PKI, Partai Buruh, Masjumi hingga Barisan Buruh Indonesia (Kahin, 1995: 231). Sebagai sebuah organisasi yang menampakkan dirinya sebagai oposisi pemerintahan, terutama ketika itu berhadapan dengan kabinet yang dipimpin Sutan Sjahrir, keberadaan Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka kemudian kerap dianggap sebagai pemberontak. Alhasil para eksponen PP kemudian menjadi target buruan pasukan pemerintah, yang mana dalam beberapa bagian kader dan anggota BTI juga ikut terseret.

Dalam periode yang kurang lebih bersamaan, beberapa pimpinan BTI kemudian terpilih untuk masuk ke dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), sebuah lembaga yang kedudukannya setara lembaga legislatif. Dua perwakilan BTI yaitu Sundjoto dan S. Sardjono duduk



**Figur 2.** S. Sardjono "Petruk", salah seorang pendiri BTI. Ia mulai menjadi Ketua Umum DPP BTI (Ketua I) setelah Kongres I yang dilangsungkan di Jember pada 1946-1947. Sempat digantikan oleh Mochamad Tauchid, Sadjarwo, dan Tjokronegoro di masa sekitar Peristiwa Madiun 1948, Sardjono kembali memimpin BTI sejak Kongres III pada 1950. Lantas ia digantikan oleh Djadi Wirosubroto ketika Kongres IV (Kongres Fusi) BTI dilaksanakan pada 1953. **Sumber:** *Suara Tani*, 25 November 1950.

dalam BP KNIP yang dipilih pada 3 Maret 1947 di Malang, Jawa Timur (Kahin, 1995: 257-258). Dari sini, terlihat bahwa BTI masuk dan terlibat aktif dalam proses melengkapi struktur negara, dalam hal ini terlibat dalam badan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di masa awal Indonesia berdiri.

Sama halnya seperti berbagai organisasi pergerakan dan politik yang berdiri pada masa-masa awal Indonesia merdeka, BTI dalam periode ini berusaha untuk ikut serta dalam proses menentukan wajah dan bentuk pemerintahan Republik Indonesia ke depannya. Ia tidak hanya berfokus pada kaum tani yang menjadi dasar dari dibentuknya organisasi ini, namun juga berupaya untuk memberikan andil dalam proses politik nasional yang ketika itu masih amat labil.

### **Aksi-aksi di Lapangan Pertanian**

Salah satu aspek yang paling menonjol dari program-program kerja yang dirumuskan oleh BTI pada tahun-tahun pertama mereka berdiri adalah mengenai modernisasi pertanian. Ide ini tentu menarik untuk ditelisik lebih mendalam, terutama terkait dengan situasi sosial politik Indonesia saat itu yang masih belum stabil. Terutama pula keadaan kaum tani Indonesia sendiri yang sejatinya masih mewarisi berbagai macam sengkaret, kerusakan, dan tentu saja pemiskinan yang luar biasa yang disebabkan oleh sistem kolonial dan feodal yang bersama-sama mengisap mereka.

Dorongan untuk melakukan modernisasi pertanian secara resmi dideklarasikan melalui keputusan kongres dalam Kongres BTI yang pertama di Jember pada pengujung 1946, tepatnya sejak 29 Desember 1946 hingga 1 Januari 1947. Dalam setahun ini, cabang-cabang BTI telah terbentuk dan tersebar di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Kongres pertama yang dilakukan pasca organisasi tersebut dideklarasikan setahun sebelumnya menghasilkan suatu paket program kerja yang dinamai *Program 2 Tahun*. Dalam paket program kerja yang diputuskan tersebut, terdapat tiga agenda besar yang menjadi fokus utama dari pergerakan yang dilakukan oleh BTI. Ketiganya adalah modernisasi pertanian, perpajakan, dan agraria. Selain itu, pendidikan terhadap kader organisasi dan kaum tani juga menjadi putusan kongres (*Suara Tani*, 25 November 1950).

Program modernisasi pertanian sejak awal memang mendapatkan porsi yang cukup dominan. Perbaikan bibit, penyempurnaan alat-alat pertanian, perbaikan sistem pengairan, penggunaan pupuk, hingga pemberantasan hama menjadi fokus pelaksanaan program tersebut. Beberapa bulan pasca Kongres I, ditargetkan setidaknya untuk musim tanam 1947-1948 harus sudah 40% dari keseluruhan luas sawah ditanami dengan bibit yang telah ditentukan. Dari sini pula kemudian rancangan target tahunan BTI mulai terbentuk (*Antara*, 1 April 1947).

Keseriusan BTI dalam mempromosikan ide-ide mengenai modernisasi pertanian salah satunya nampak dari cara mereka menyajikan informasi dalam *Soeara Tani*,<sup>3</sup> terbitan bulanan resmi yang mereka miliki. Dalam *Soeara Tani* edisi 15 Juni 1947, pada bagian sampul majalah, ditampilkan sebuah gambar ilustrasi traktor pembajak tanah yang sedang dikemudikan oleh seorang petani. Di bawahnya tertulis: “Dimanakah gerangan letak rahasia kemadjoean teknik Pertanian? Perdjongan, Kemaean bekerdja, Tenaga, Fikiran dan Persatoean. Teknik pertanian madjoe berarti madjoenja kemakmoeran masjarakat didalamnja.” Selain gambar ilustrasi yang menghiasi kulit muka majalah setebal dua belas halaman tersebut, di dalamnya terdapat dua foto lain yang memperlihatkan penggunaan mesin pemotong tebu dan mesin pembajak tanah. Dari potongan fakta ini, dapat disebut mekanisasi dan modernisasi pertanian menjadi kata kunci penting untuk memahami arah juang BTI di masa awal mereka berdiri.

Majalah yang terbit enam bulan pasca kongres pertama ini didominasi oleh artikel-artikel yang menjelaskan mengapa program modernisasi pertanian menjadi penting dan perlu dilaksanakan. Dalam editorial edisi tersebut juga ditegaskan bahwasanya modernisasi pertanian perlu segera dimulai. Dalam hal ini, rancangan program modernisasi tersebut telah disusun

---

3) Sebelum ejaan Suwandi diresmikan dan digunakan, nama majalah resmi BTI adalah *Soeara Tani*, sebagaimana yang tertera dalam edisi tahun 1947. Baru ketika memasuki 1950, nama majalah diubah menjadi *Suara Tani*.



**Figur 3.** Sampul majalah *Suara Tani* menunjukkan penggunaan mesin penyebar benih yang ada di luar negeri. Promosi penggunaan mesin modern seperti ini gencar dilakukan oleh BTI di tengah masih minimnya sentuhan modernitas dan mekanisasi dalam pertanian Indonesia. **Sumber:** *Suara Tani*, 31 Mei 1951

dan disiapkan oleh pengurus pusat BTI, yang sebelumnya telah diputuskan dan disahkan melalui kongres. Kebutuhan yang diperlukan berikutnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang cakap dan juga dana untuk menyokong program-program tersebut.

Tentu saja selain ditujukan untuk kader-kader dan anggota BTI sendiri, seruan mengenai perlu segera dilaksanakannya modernisasi pertanian ini diarahkan kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan dan pengambil keputusan untuk rakyatnya. Namun perlu diingat bahwasanya situasi sosial dan politik saat itu tengah sulit di tengah kecamuk Revolusi yang membuat jalannya pemerintahan Indonesia belum stabil. Hanya saja, hal tersebut tidak begitu menghalangi usaha dan kampanye yang dilakukan oleh para organisator BTI. Dalam sebuah rapat di Karesidenan Pati pada 1946, Mochamad Tauchid menekankan bahwa perlu segera dibuat alat-alat pertanian bagi anggota BTI. Pembuatan alat-alat tersebut memanfaatkan bantuan besi seberat 10 ton dari Djawatan Pertanian (*Api Rakjat*, 22 Juli 1946). Artinya, di tengah kecamuk Perang Kemerdekaan, usaha-usaha dan perhatian terhadap dunia pertanian masih selalu diperjuangkan dan coba untuk dilaksanakan.

Perlu digarisbawahi bahwa ide mengenai modernisasi pertanian yang dimaksud oleh BTI, terutama jika menilik pada bagaimana hal tersebut dipromosikan, adalah model kemajuan peralatan teknologi pertanian yang lazim digunakan dalam sistem pertanian di Eropa dan Amerika, dua benua yang dapat disebut sudah memasuki fase industrialisasi dan modernisasi

teknologi sejak abad 19. Keberadaan mesin pembajak tanah, mesin pemotong padi, mesin pengatur air, termasuk pupuk kimia dan pestisida menjadi perhatian utama dan tuntutan yang disuarakan oleh BTI pada awal organisasi ini berdiri. Dalam edisi khusus ulang tahun kelima BTI, *Suara Tani* menampilkan dalam dua halaman penuh gambar alat-alat mekanis pertanian yang digunakan di Mindanao, Filipina (*Suara Tani*, 25 November 1950).<sup>4</sup> Dengan judul “Halaman Tehnik Pertanian”, ditampilkan antara lain traktor, bulldoser, mesin bajak dan garu, mesin penebar benih, mesin pemberantas hama, hingga mesin kombinasi untuk mengetam dan menggiling padi. Di samping alat-alat modern dengan teknologi mesin yang bisa dibilang canggih ini, juga ditampilkan kantor perusahaan pertanian milik negara yang mengatur distribusi dan penggunaan alat-alat tersebut. Kemajuan teknik pertanian seperti ini, menurut penulis artikel tersebut, bisa diterapkan di Indonesia asalkan ada kemauan dari pemerintah dan pemimpin negara untuk melaksanakannya.

Dalam sebuah edisinya, *Suara Tani* menerbitkan artikel mengenai pentingnya mekanisasi pertanian yang dianggap dapat membawa kemakmuran bagi kaum tani (*Suara Tani*, 15 April 1951). Artikel tersebut ditulis oleh H. Koningsberger dan disadur dari majalah *Penuntun*. Ia memulainya dari kenyataan bahwa di Amerika Serikat jumlah kaum tani secara presentase lebih sedikit dibanding jumlah populasi negara tersebut secara umum. Sehingga dengan demikian, produksi yang dilakukan kaum tani tidak hanya untuk memenuhi dirinya sendiri, namun juga untuk sekian populasi lainnya yang tidak memproduksi bahan makanan. Tentu saja hal seperti ini terjadi di seluruh belahan dunia lainnya, tidak hanya di Amerika Serikat saja. Maka kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mekanisasi pertanian menjadi kuncinya. Namun ia juga menyebutkan faktor-faktor pendukung jalannya “super-mekanisasi” di Amerika Serikat seperti misalnya lahan pertanian yang masih terbentang sangat luas dan bahan bakar yang murah, yang mungkin saja tidak ditemui di tempat lain.

“Orang tani bangsa Amerika bukanlah petani sedjati, melainkan seorang mekanisien-diladang. Semua kaum tani itu, jang berdjumlah 8,3 djuta, mempunjai 9 djuta buah kendaraan bermotor. Hampir tiada lagi jang memelihara kuda atau keledai; dia tidak lagi menanam gandum makanan kuda, melainkan membeli bensin untuk motornja. Tanah ladangnja tiada memerlukan pekerdja, hanja seorang tani dengan mesinnja segala pekerdjaan menabur, meluku menuai, berlaku amat tjepat, sehingga kaum tani itu tidak terlalu bergantung pada keadaan tjuatja.” (*Suara Tani*, 15 April 1951)

4) Gambar-gambar tersebut disebutkan diperoleh dari seorang anggota redaksi yang berkunjung ke negara tetangga tersebut beberapa waktu sebelumnya. Kemungkinan besar, jika menilik tulisan-tulisan dari edisi sebelumnya yang membahas mekanisasi pertanian di Filipina, sosok anggota redaksi yang dimaksud tersebut adalah Ir. Sumijoto Kasanmuntalib.

Selain mengulas mengenai pentingnya mekanisasi pertanian, redaktur juga menerbitkan artikel mengenai sistem pertanian di Hongaria, yang dinilai jauh sudah maju dan menggunakan teknologi modern dalam proses produksinya (*Suara Tani*, 31 Mei 1951). Pada dasarnya, kondisi pertanian di sana nyaris mirip dengan di Indonesia, terutama dalam hal penguasaan tanah. Namun setelah perang, reforma agraria alias redistribusi kepemilikan tanah yang kemudian menjadi kunci bagi proses perbaikan sistem pertanian di Hongaria. Maka kemudian, mekanisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, pembangunan balai kultural untuk kursus petani, pendirian koperasi produksi dan stasiun mesin menjadi kunci bagi kemajuan sistem pertanian di sana. Dari sekian faktor ini, penulis menyoroti ihwal pentingnya mekanisasi pertanian jika Indonesia ingin mencapai kemajuan di sektor pertanian layaknya di Hongaria.

Kegandrungan akan modernisasi pertanian ini misalnya dapat dilihat dari sebuah artikel yang ditulis Aidit di *Suara Tani*. Ia menulis bahwa teknik pertanian menentukan segala-galanya.

“Pertanian kita adalah bahagian jang paling tidak mengenal kemesinan atau teknik modern djika dibanding dengan bahagian2 lain –jika dibanding dengan industri dan transport. Kebutuhan akan mesin modern lebih besar dan lebih mendesak dikalangan pertanian daripada dibahagian lain.” (*Suara Tani*, 15 Juni 1947)

Ia kemudian melanjutkan bahwa ketika modernisasi pertanian dapat tercapai, barulah sosialisme dan masyarakat sosialis dapat terbangun. Aidit menilai dengan majunya teknik pertanian, maka kaum tani akan dapat beralih dari takhayul, dogmatisme, fanatisme, sampai fatalisme menuju ke taraf manusia yang lebih tinggi lagi.

Cita-cita menuju modernisasi pertanian di Indonesia yang diimpikan oleh BTI tersebut bukannya tidak mendapat semacam tantangan. Dalam edisi yang sama, Mr. Soemanang menyebutkan bahwa di luar tujuannya untuk memperbaiki nasib kaum tani, terdapat beberapa hal yang menurutnya perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan kesiapan dari kaum tani itu sendiri. Dalam pandangannya, selama ini kaum tani terbiasa bekerja mengoptimalkan waktu dari pagi hingga petang dengan menggunakan tenaga fisik semaksimal mungkin. Ketika teknologi pertanian datang, yang mana artinya membuat waktu kerja relatif lebih cepat, menjadi suatu kekhawatiran ketika kemudian petani memiliki waktu senggang yang lumayan banyak dan menyebabkan mereka memanfaatkan waktu luang tersebut untuk “keinginan mentjari hiboeran jang meroesakkan moraal” (*Suara Tani*, 15 Juni 1947). Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa keberadaan teknologi pertanian akan menggeser tenaga-tenaga kerja yang selama ini mengolah tanah dengan cara manual. Intinya, ada ketakutan pula terhadap bakal munculnya surplus tenaga kerja

di perdesaan beserta dampak turunannya.

Maka kemudian Soemanang menyarankan agar waktu-waktu yang dinilai bakal senggang tersebut dapat digunakan oleh BTI untuk melaksanakan kerja-kerja keorganisasian semisal melakukan pemberantasan buta huruf atau juga memberikan hiburan-hiburan yang sehat, meski tidak diterangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hiburan sehat tersebut. Artinya, rencana memajukan dan memperbaharui teknologi yang digunakan kaum tani jangan sampai membawa dampak sosial dan budaya yang tidak baik, yang kemungkinan dapat membawa efek buruk bagi masyarakat tani itu sendiri.

Yang jelas, ide tentang modernisasi pertanian sejak kongres pertama ini menjadi program utama BTI dan dipersiapkan dengan cukup serius. Dalam rentang waktu sekitar enam bulan pasca kongres, mereka menerbitkan sebuah risalah berjudul *Rentjana Modernisasi Pertanian* yang kemudian disebar ke seluruh organisasi cabang dan daerah sebagai sebuah buku pedoman (*Soeara Tani*, 15 Juni 1947). Sebagai ongkos cetak, tiap eksemplar dihargai senilai 1 rupiah. Jika menilik data kongres pertama, setidaknya hingga awal 1947 BTI telah memiliki 76 organisasi cabang dan 16 daerah yang tersebar di seluruh Jawa dan Madura.

Kongres pertama BTI tersebut juga dihadiri oleh Alimin, tokoh Partai Komunis Indonesia, yang sekaligus memberikan pidato dalam acara tersebut (*Suara Tani*, 25 November 1950). Ia menjelaskan mengenai kedudukan kaum tani sebagai rekan seiring bagi kelas proletariat, termasuk dalam hal

ini *landproletariat* seperti buruh *onderneming* (perkebunan), persilan, plantage, dll. Berdasarkan pengalamannya ketika tinggal di Eropa, Alimin menilai bahwa keadaan kaum tani di Indonesia dan Asia secara umum berada dalam situasi yang lebih sulit. Di Indonesia, sejak masa kolonial petani melarat dan menderita di bawah tekanan dua sistem sekaligus: keberadaan kapitalisme asing dan sistem feodal yang bercampur dengan kolonial. Ketika Indonesia merdeka, maka sudah semestinya muncul rancangan dan usulan baru yang harus segera dilakukan dalam waktu beberapa tahun ke depan untuk segera mengentaskan kaum tani dari kemiskinan. Teori-teori yang telah dikemukakan oleh Marx, Engels, Lenin, dll. menurutnya kemudian dapat dipakai menjadi pegangan bagi organisasi tani Indonesia untuk melakukan itu semua.



**Figur 4.** Sampul depan majalah BTI *Soeara Tani* yang menampilkan ilustrasi traktor pemanen padi, sesuatu yang tentu saja masih asing bagi sistem pertanian Indonesia masa itu. **Sumber:** *Soeara Tani*, 15 Juni 1947

Maka kemudian Alimin mengusulkan setidaknya sebelas hal yang dapat menjadi semacam rancangan pembangunan ekonomi pertanian Indonesia. Secara ringkas, beberapa hal usulan Alimin tersebut antara lain komite pembagian tanah untuk kaum tani, modernisasi alat-alat pertanian, mendirikan biro penerangan pertanian, pendidikan teknik pertanian, pemberian modal melalui kredit dan koperasi, penyelidikan benih dan tanah, hingga membentuk komite yang mengurus soal peternakan. Meski nampaknya seruan Alimin lebih diarahkan kepada kaum komunis, pada prinsipnya ide-ide yang dia sampaikan sejalan dengan program-program BTI itu sendiri. Alimin kemudian menyimpulkan bahwa kaum tani harus secepatnya diorganisasi dan dibangun kesadaran kelasnya agar kemajuan pertanian dapat segera tercapai.

Sejalan dengan pendapat Alimin di atas, salah satu penekanan BTI dalam mengusahakan perbaikan nasib kaum tani Indonesia adalah dengan membongkar struktur agraria warisan kolonial yang masih terus berjalan di masa kemerdekaan. Dalam hal ini, struktur pemilikan dan penguasaan tanah menjadi salah satu hal yang disoroti terus menerus oleh karena efeknya yang menyengsarakan dan merugikan kaum tani. Dalam Kongres I di Jember pada 1946, sebuah prasaran muncul dari salah seorang kader BTI terkait tanah-tanah partikelir dan problem bagi kaum tani di dalamnya (*Suara Tani*, 15 Maret 1951).<sup>5</sup> Prasaran tersebut disampaikan Sugiharto, salah seorang kader BTI yang nantinya akan masuk dalam struktur pengurus pusat setelah Kongres III di Yogyakarta pada 1950.

Dalam prasarannya, Sugiharto secara kronologis menjelaskan dengan ringkas proses munculnya sistem tanah partikelir dan jumlah luas tanah tersebut di seluruh Pulau Jawa, yang jika dirunut telah ada sejak masa VOC berkuasa di awal abad ke-17. Selain proses kemunculannya, yang menjadi penekanan adalah mengenai kondisi penduduk pribumi di dalamnya yang mesti membayar berbagai macam pajak dan pungutan kepada tuan-tuan tanah partikelir tersebut. Para tuan tanah yang nyaris seluruhnya adalah orang-orang Eropa memajaki hampir semua lini hasil produksi kaum tani, mulai dari sewa tanah itu sendiri, pajak padi, palawija, pohon, hingga ikan.

Berbagai macam pungutan pajak dan cukai di atas yang menjadi kewajiban kaum tani nyatanya tidak dibarengi dengan hak penghidupan yang layak bagi mereka. Persoalan pendidikan, kesehatan, hingga modal produksi seolah bukan menjadi urusan sang tuan tanah. Sistem pemilikan tanah secara luas yang terkonsentrasi pada segelintir orang inilah yang kemudian digugat oleh kader BTI tersebut. Maka penghapusan sistem tersebut menjadi penting guna memperbaiki struktur penguasaan tanah yang dianggap timpang dan eksploitatif. Juga penghapusan tanah-tanah partikelir itu juga mesti disusul

---

5) Prasaran ini mulanya akan diterbitkan menjadi sebuah buku. Namun oleh karena beberapa pertimbangan, akhirnya dimuat sebagai artikel dalam dua edisi *Suara Tani*.

dengan pengembalian tanah-tanah tersebut kepada pemerintah melalui mekanisme jual beli (*Suara Tani*, 15 April 1951). Hal inilah yang menjadi penekanan Sugiharto dalam prasarannya tersebut, selain juga usulan untuk menghapus pajak bumi dan menggantinya dengan pajak penghasilan yang dianggap lebih adil. Selain pengembalian tanah dan penghapusan pajak, pembangunan jalan, pasar, saluran air, sarana pendidikan, hingga poliklinik juga menjadi usulan agar segera dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah bekas tanah-tanah partikelir tersebut nantinya guna memenuhi kebutuhan penduduk, terutama masyarakat tani di dalamnya.

Selain persoalan modernisasi pertanian yang menurut BTI perlu segera dilaksanakan, hasil kongres pertama ini juga berfokus pada persoalan pemilikan dan penguasaan tanah. Bidikan utamanya tentu saja menghapus segala bentuk sistem feodalisme dalam lapangan pertanian. Ada dua cara yang kemudian dapat dilakukan. Pertama, pemerintah harus membeli tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh tuan-tuan tanah dengan berbagai macam bentuk kepemilikan seperti partikelir, perdikan, konsesi, *erfpacht*, dll. Kedua, tanah-tanah yang nantinya sudah dibeli ini harus dijadikan *onderneming* alias perkebunan milik pemerintah atau juga pemerintah menjualnya kepada tani penggarap (*Suara Tani*, 30 April 1951).

Maka kemudian, selain menggalakkan ide mengenai modernisasi pertanian, sepanjang periode Revolusi di tengah situasi perang dan usaha mempertahankan diri dari kembalinya kuasa kolonial, BTI juga gencar menyerukan isu mengenai perbaikan struktur pemilikan tanah. Problem agraria tetap menjadi persoalan dan perhatian utama bagi BTI, karena bagaimanapun juga usaha perbaikan nasib kaum tani Indonesia tidak mungkin tidak menyinggung soal kepemilikan dan penguasaan tanah yang dinilai amat timpang sejak masa kolonial.

Misalnya saja, dalam sebuah rapat umum yang diselenggarakan BTI Magelang bersama-sama dengan Sarekat Rakjat pada 1948, dengan dihadiri sekitar seribu kaum tani, muncul tuntutan kepada pemerintah agar mengembalikan tanah-tanah di lima desa (Mertoyudan, Bondowoso, Banjarnegara, Sukorejo, dan Seneng) yang ada di Mertoyudan, Magelang kepada kaum tani (*Suara Ibu Kota*, 30 Juli 1948). Pada mulanya, tanah seluas kurang lebih 600 ha itu dikuasai oleh Tentara Genie di zaman Belanda dengan cara mengambil paksa dari penduduk desa. Konon tanah tersebut akan digunakan sebagai lapangan terbang. Namun hingga Indonesia merdeka nyatanya rencana tersebut urung terlaksana oleh karena balatentara Jepang lekas tiba pada 1942. Seiring berjalannya waktu, kaum tani perlahan mulai menggarap tanah terlantar tersebut. Hanya saja mereka mengharapkan pengesahan dari pemerintah agar tidak terancam terusir sewaktu-waktu. Aksi rapat umum dan tuntutan tanah untuk kaum tani ini sendiri pada dasarnya dilakukan sebagai bagian dari Program Nasional BTI bagian Agraria artikel 3.

Hanya saja, pada dasarnya berbagai macam usulan dan program yang dikemukakan oleh BTI ini tidak dapat dengan serta merta dilaksanakan. Situasi Revolusi membuat berbagai macam program tersebut seakan baru sebatas wacana di atas kertas semata. Meski cabang-cabang BTI telah didirikan di berbagai tempat, terutama di Jawa dan Sumatera, tetap saja banyak program kerja yang berujung tidak terlaksana. Terutama sekali program-program modernisasi pertanian yang sama sekali tidak mungkin dilakukan di tengah situasi perang yang berkecamuk. Berakhirnya Perang Kemerdekaan dengan Belanda di pengujung 1949 kemudian dapat disebut menjadi salah satu momentum bagi usaha lebih lanjut BTI dalam mewujudkan usahanya memperbaiki nasib kaum tani Indonesia.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BTI terbentuk dari elemen kaum tani yang ingin turut andil sebagai warga negara di negeri yang barusaja diproklamirkan. Keterlibatan ini tentu saja penting terutama untuk memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait bidang pertanian. Hal ini penting mengingat selama beberapa waktu lamanya mereka nyaris tidak bisa bersuara maupun berpendapat. Jika di masa kolonial mereka hanya berposisi sebagai subjek jajahan yang pasif, maka pada masa Jepang mereka sepenuhnya hanya diposisikan sebagai produsen pendukung logistik pangan guna kepentingan perang Jepang.

Maka untuk membenahi kerusakan kondisi sosial-ekonomi petani yang sudah sedemikian parah, para pendiri dan aktivis BTI mengusulkan program modernisasi pertanian sebagai solusi bagi pengentasan masalah kaum tani. Kegandrungan terhadap ide modernisasi dan mekanisasi pertanian ini tergambar dalam berbagai terbitan BTI pada tahun-tahun tersebut, selain juga mereka putuskan secara formal dari hasil Kongres Pertama BTI pada 1946. Hanya saja, di tengah situasi perang untuk mempertahankan kemerdekaan, usulan-usulan BTI tersebut nyaris tidak dapat terwujud dengan baik. Selain karena situasi yang tidak mendukung bagi pelaksanaan program karena labilnya struktur dan kondisi sosial-politik yang ada, internal organisasi BTI sendiri mengalami gejolak. Banyak kader maupun pimpinan BTI yang masuk ke dalam arus friksi politik, sehingga organisasi nyaris tidak dapat berjalan dengan stabil.

Jadi, sepanjang Revolusi Indonesia berlangsung sejak 1945 hingga akhir 1949, dalam rentang ini BTI nyaris belum dapat mengimplementasikan program kerjanya dengan konkret. Meski di sisi lain, secara organisasi BTI telah berhasil mendirikan banyak cabang di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Keterlibatan dalam parlemen dan pemerintahan, maupun dalam front perjuangan bersenjata, masih menjadi pilihan yang realistis yang dilakukan oleh BTI. Baru kemudian ketika Indonesia memperoleh pengakuan

kedaulatan penuh dari Belanda pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949, mulai awal 1950 BTI dapat menyusun kembali organisasi dan perlahan terus bergerak hingga menjadi organisasi tani terbesar pada dekade 1960-an.

## Referensi

### Buku

- Ahmad Nashih Luthfi (2011). *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta: STPN Press, Pustaka Ifada, SAINS.
- Aminuddin Kasdi (2001). *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Yogyakarta: Jendela.
- Andi Achdian (2009). *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press.
- Anderson, Benedict (1988). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Grace Leksana (2016). 'Jagus dan Hilangnya Kedaulatan Pangan Kita'. <https://indoproggress.com/2016/10/jagus-dan-hilangnya-kedaulatan-pangan-kita/> (diakses 19-10-2023)
- Houben, Vincent (2017). *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Huizer, Gerrit (1972). *Peasant Mobilisation and Land Reform in Indonesia*. The Hague: Institute of Social Studies.
- Kahin, George McTurnan (1995). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Surakarta: Sebelas Maret University Press dan Sinar Harapan.
- Kroef, Justus M. van der (1963). 'Peasant and Land Reform in Indonesian Communism', *Journal of Southeast Asian History*, 4, 1.
- Kuntowijoyo (1993). *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- McVey, Ruth T. (1990). 'Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution', *Indonesia*, 50, 2.
- Mubyarto (1983). *Politik Pertanian dan Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mortimer, Rex (1972). *The Indonesian Communist Party & Land Reform*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- P.J. Suwarno (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sartono Kartodirdjo (1984). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- White, Ben (2016). 'Remembering the Indonesian Peasants' Front and Plantation Workers' Union (1945-1966)', *The Journal of Peasant Studies*, 43, 1.

### Surat Kabar

- Antara*, 1 April 1947.
- Api Rakjat*, 22 Juli 1946.
- Berita Indonesia*, 9 November 1945.
- Berita Indonesia*, 28 November 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 19 Oktober 1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 29 Oktober 1945.

*Kedaulatan Rakjat*, 27 November 1945.

*Kedaulatan Rakjat*, 5 Desember 1945.

*Soeara Tani*, 15 Juni 1947.

*Suara Ibu Kota*, 30 Juli 1948.

*Suara Tani*, 25 November 1950.

*Suara Tani*, 15 April 1951.

*Suara Tani*, 30 April 1951.

*Suara Tani*, 31 Mei 1951.

*Suara Tani*, 15 Maret 1951.